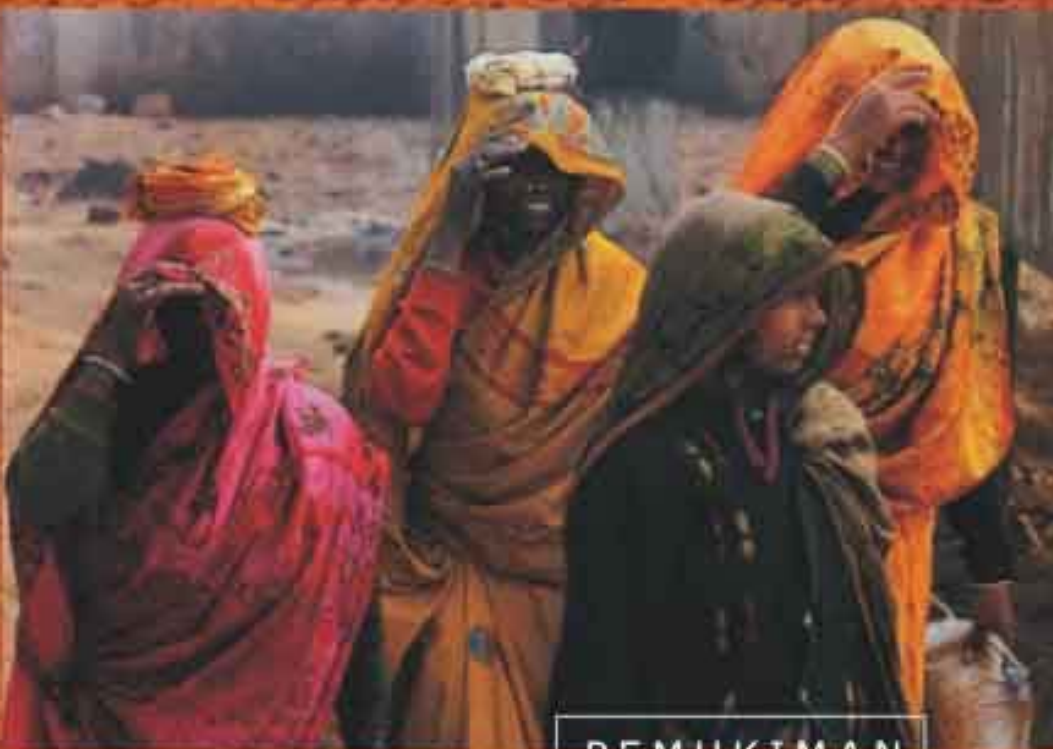


# Daftar Periksa (*Checklist*) Gender



PEMUKIMAN  
KEMBALI

## Daftar Isi

Tujuan Daftar Periksa	1
Mengapa Gender Penting dalam Proyek-Proyek Pemukiman Kembali?	1
Isu Gender dalam Pemukiman Kembali	3
Konsultasi dan Partisipasi	7
Perencanaan Pemukiman Kembali	9
Mempertimbangkan Perbedaan Gender dalam Pengumpulan Data	9
Menentukan Pemberian Nama dan Pemenuhan Syarat	10
Membangun Kerangka Kerja Kelembagaan Peka-Gender untuk	
Proyek-Proyek Pemukiman Kembali	12
Mengembangkan Pilihan-pilihan atas Pemukiman Kembali	
dan Kompensasi	13
Pemukiman Kembali dan Rehabilitasi	15
Pemilihan Lahan	16
Perumahan	17
Kelayakan dan Keamanan Hunian	18
Infrastruktur Sipil	19
Isu-isu Transisi	24
Kompensasi	25
Keamanan Hak untuk Tinggal	26
Restorasi Pendapatan	27
Pertimbangan-Pertimbangan Kelembagaan	29
Kapasitas Kelembagaan	29
Mekanisme Tuntutan Ganti Rugi	31
Pendanaan	32
Anggaran Pemukiman Kembali	32
Monitoring dan Evaluasi	33
Instrumen-instrumen Internasional	34
Referensi	37

## Singkatan

GAD	Gender and Development (Gender dan Pembangunan)
GRC	Grievance Redress Committee (Komite Penggantian Kerugian atas Keluhan)
M&E	Monitoring and Evaluation (Pemantauan dan Evaluasi)
NGO	Non-Government Organization (Organisasi Non-Pemerintah / Ornop)
PPTA	Project Preparatory Technical Assistance (Bantuan Teknis Persiapan Proyek)
RR	Resettlement and Rehabilitation (Pemukiman Kembali dan Rehabilitasi)
WID	Women In Development (Perempuan Dalam Pembangunan)

## Tujuan Daftar Periksa

Tujuan dari daftar periksa ini adalah untuk membantu para staf dan konsultan ADB mengimplementasikan kebijakan dan sasaran-sasaran strategis ADB dalam hal Pemukiman Kembali (November 1995) dan Kebijakan atas Gender dan Pembangunan (Juni 1998). Daftar periksa ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi para pengguna untuk mengidentifikasi isu-isu utama mengenai gender dalam perencanaan, implementasi, dan monitoring, serta dalam mendesain rencana pemukiman kembali yang melibatkan perbedaan gender.

Pada tahun 1998, ADB mengeluarkan *Handbook on Resettlement: A Guide to Good Practice*. Buku pedoman ini bermanfaat bagi para staf operasional ADB, konsultan, dan staf lembaga pelaksana di negara-negara anggota ADB yang sedang berkembang (DMC) yang berperan dalam perencanaan pemukiman kembali dan pengelolaan proyek-proyek yang didanai oleh ADB.

Daftar periksa dalam bidang gender dan pemukiman kembali ini telah disusun sebagai pelengkap *Handbook* tersebut. Isu-isu gender perlu ditangani pada seluruh proses pemukiman kembali dan rehabilitasi. Daftar periksa ini disusun untuk memberikan pedoman bagi penggunaannya melewati beragam tahapan dalam siklus proyek (sebagaimana ditunjukkan dalam Buku Pedoman tersebut). Daftar periksa ini akan bermanfaat untuk mengidentifikasi isu-isu gender pada setiap tahapan dan membantu dalam merancang strategi yang mencakup gender, komponen, dan indikator untuk menjawab isu-isu tersebut.

Daftar periksa ini disusun oleh Enakshi Ganguly, konsultan staf; Ruwani Jayewardene; dan Shireen Lateef. Ferdinand Reclamado memberikan bantuan produksi.

---

## Mengapa Gender Penting dalam Proyek-proyek Pemukiman Kembali?

Proyek-proyek pembangunan yang mengubah pola-pola penggunaan tanah, air, dan sumber daya alam lainnya menyebabkan serangkaian dampak pemukiman kembali. Kerugian-kerugian pemukiman kembali muncul berkenaan dengan akuisisi tanah, melalui pengambilalihan dan penggunaan “hak pemerintah” atau pengukuran-pengukuran peraturan lainnya untuk mendapatkan tanah dan aset/kekayaan. Hal ini akan mengakibatkan kehilangan mata pencaharian dan sumber daya-sumber daya serta hancurnya jaringan masyarakat dan layanan sosial. Kerugian sumber daya-sumber daya untuk penghidupan dan pendapatan akan mengakibatkan kesulitan hidup, tekanan-tekanan sosial, dan pemiskinan. Orang-orang yang terkena akibatnya tidak memiliki pilihan lain kecuali membangun kehidupan mereka, pendapatan mereka, dan basis kekayaan mereka.

Proses dislokasi ekonomi dan sosial ini dapat dan sering kali membuat kesenjangan, dan ketidaksetaraan gender yang ada menjadi lebih buruk. Dalam kebanyakan masyarakat, kaum perempuan tidak menikmati hak-hak memiliki tanah dan bangunan (properti), memiliki tingkat pendidikan yang rendah daripada laki-laki, bekerja dalam sektor informal, mengalami mobilitas yang terbatas, dan memikul tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti air, bahan bakar, dan pakan ternak. Oleh sebab itu gangguan ekonomi dan sosial akan mengakibatkan kesulitan yang lebih besar bagi kaum perempuan daripada laki-laki.

Dalam seluruh situasi perubahan, orang—secara individual maupun sebagai masyarakat—menerima dampak yang berbeda-beda. Gender merupakan faktor yang sangat penting dalam penerimaan dampak. Biasanya, perhatian terhadap perencanaan pemukiman kembali difokuskan pada tingkat rumah tangga. Kegagalan untuk memahami dinamika dalam rumah tangga akan lebih berdampak kepada kaum perempuan daripada kaum laki-laki. Pada tingkat kebijakan dan kelembagaan, bias yang melekat padalam masyarakat akan menghalangi perempuan untuk mengambil manfaat dari peluang-peluang yang diberikan melalui proyek.

Isu-isu mengenai gender dalam proyek-proyek pemukiman kembali tidak dapat diselesaikan dengan baik kecuali bila perhatian terhadap hak-hak dan kesetaraan diidentifikasi, dihadapi, dan ditangani.

“Hak-hak tersebut mencakup: hak terhadap bangunan/ properti; hak menggunakan, merencanakan, dan mengelola sumber daya- setempat; hak untuk melakukan proses pembuatan keputusan; hak untuk berpartisipasi; hak untuk mendapatkan informasi; dan hak untuk menuntut persamaan; hak terhadap cara penggunaan sumber daya setempat; hak untuk bernegosiasi; hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan bijak; hak untuk menikmati sumber daya yang dimiliki bersama; hak untuk mendapat upah yang sama untuk pekerjaan yang sama; dan hak untuk mendapatkan pekerjaan” (Sinivasan 2001).

### Mengapa Gender Penting dalam Pemukiman Kembali?

- ➔ Perbedaan gender yang telah ada dalam masyarakat dan keluarga cenderung sering lebih memperburuk tekanan-tekanan sosial dan ekonomi.
  - ➔ Kaum perempuan tidak memiliki hak-hak atas kepemilikan tanah dan properti.
  - ➔ Kaum perempuan memiliki tingkat pendidikan, ketrampilan, kesehatan, dan gizi yang rendah daripada laki-laki.
  - ➔ Kaum perempuan bekerja dalam sektor informal seperti pertanian dan mengumpulkan hasil hutan. Mereka sama-sama memperhatikan sumber daya-sumber daya untuk mata pencaharian.
  - ➔ Mobilitas yang terbatas dan miskinnya pemaparan pada dunia luar merupakan 2 faktor dari faktor-faktor tertentu-gender yang berakibat pada miskinnya kemampuan kaum perempuan untuk dapat menyesuaikan diri dengan situasi-situasi baru.
  - ➔ Kaum perempuan cenderung memiliki tanggung jawab atas kebutuhan-kebutuhan dasar seperti bahan bakar, pakan untuk ternak, nutrisi, air, dan sanitasi. Tidak adanya hal-hal tersebut akan memberikan dampak yang lebih besar pada perempuan daripada laki-laki.
  - ➔ Runtuhnya jaringan masyarakat dan sosial lebih mempengaruhi kaum perempuan daripada laki-laki. Jaringan sosial merupakan sebuah sumber bantuan pada saat krisis dan memberikan keamanan pada rumah tangga.
  - ➔ Disparitas gender yang melekat dalam kebiasaan dan tradisi sosial akan mengakibatkan kaum perempuan rentan terhadap kekerasan dan tekanan. Situasi-situasi kesulitan keadaan ekonomi dan sosial akan menciptakan kekerasan lebih banyak terhadap kaum perempuan dan menambah kerentanan mereka.
  - ➔ Status gizi kaum perempuan lebih rendah daripada laki-laki, sementara itu angka kematian dan angka kesakitan lebih tinggi. Kesulitan-kesulitan ekonomi dan sosial dapat memperburuk situasi tersebut dan menyebabkan kemunduran lebih lanjut pada kesehatan kaum perempuan.
  - ➔ Dampak yang merugikan kaum wanita akan menjadi beban bagi kesejahteraan keluarga, khususnya anak-anak dan orang berusia lanjut.
-

## Isu Gender dalam Pemukiman Kembali

**Miskinnya hak-hak atas kepemilikan tanah dan properti tidak memungkinkan kaum perempuan untuk memiliki akses untuk mendapatkan kompensasi.** Dalam kebanyakan proyek, kompensasi, pemukiman kembali, dan rehabilitasi didasarkan pada kepemilikan sah atas tanah dan properti. Pada masyarakat umumnya, kaum perempuan tidak memiliki hak-hak legal atas tanah dan properti walaupun telah menikmati hak-hak untuk menggunakan milik orang lain atau telah bergantung pada mereka. Oleh karenanya, mereka tidak dapat memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kompensasi dan manfaat lainnya yang tersedia.

Secara tradisional, di dalam masyarakat yang patriakat dan patrilineal, tanah dan properti diberikan dari tetua laki-laki kepada pewaris laki-laki. Di dalam banyak negara Asia dan Pasifik, kaum perempuan boleh menggunakan hak-hak atas tanah dan hutan, namun mereka jarang diperbolehkan mewarisi tanah yang mereka gunakan. Pembayaran kompensasi terhadap hal-hal yang memiliki status hukum/sah tersebut bersifat bias gender secara intrinsik. Oleh karena tanah dan bangunan utamanya didaftarkan atas nama laki-laki, maka perempuan biasanya tidak disertakan untuk menerima kompensasi.

**Restorasi mata pencaharian dan pendapatan sama-sama penting bagi perempuan dan laki-laki.** Kaum perempuan sangat berkaitan dalam sektor informal—mengumpulkan hasil hutan, bekerja di ladang, atau menjual barang-barang. Kegiatan-kegiatan ekonomi kaum perempuan dapat merupakan sumber yang penting bagi pendapatan rumah tangga. Dislokasi dapat mengakibatkan kerugian/hilangnya mata pencaharian, yang menambah kesulitan ekonomi kaum perempuan. Oleh karenanya, penting untuk memperhitungkan aktivitas-aktivitas ekonomi kaum perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemukiman kembali.

**Rendahnya tingkat pelatihan dan pendidikan kaum perempuan membatasi pilihan-pilihan atas berbagai alternatif.** Paket rehabilitasi mencakup peluang kompensasi untuk mendapat pekerjaan-pekerjaan alternatif. Pilihan-pilihan untuk menggali alternatif dan pilihan-pilihan mata pencaharian bagi kaum perempuan sangat terbatas karena rendahnya tingkat ketrampilan, pendidikan, dan wawasan mereka. Merencanakan pilihan pekerjaan dan mata pencaharian bagi kaum perempuan sangat krusial.

**Disparitas gender dalam rumah tangga menjadi lebih parah.** Dalam situasi pemindahan paksa (*invoulunteer resettlement*), disparitas gender yang ada dalam masyarakat dan keluarga cenderung menjadikan lebih buruk, yang menyebabkan kaum perempuan dan anak-anak, khususnya anak-anak perempuan, menjadi rentan. Hal ini termanifestasi dalam ketidakwajaran atau kekerasan atau menurunnya status gizi.

**Pemindahan secara paksa dapat meningkatkan beban bagi kaum perempuan.** Biasanya, kaum perempuan bertanggung jawab atas makanan, bahan bakar, dan pemberian pangan untuk ternak dalam keluarga. Sering kali, bahan bakar dan pakan untuk ternak menjadi langka sebagai akibat dari dampak lingkungan yang negatif atas sumber daya alam seperti hutan, air, dan tanah. Hal ini akan menyebabkan dampak langsung bagi kaum perempuan, karena mereka bertanggung jawab mengumpulkan bahan bakar dan pakan untuk ternak. Apabila dampak ini tidak diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemukiman kembali, akan membuat mereka menghabiskan waktu dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Selain itu, kehilangan daerah untuk menggembalakan ternak dapat berdampak pada penjualan ternak.

Kajian-kajian di seluruh dunia telah menunjukkan peningkatan dalam tingkat ketidakwajaran dan tingkat kematian yang diakibatkan oleh penempatan involunter. Tingkat kematian berdasarkan usia tertentu menunjukkan adanya tingkat kematian dan ketidakwajaran yang tinggi pada anak-anak perempuan dan perempuan dewasa sampai usia 35 tahun, yang merupakan usia produktif. Dengan kenyataan ini, terdapat kemungkinan bahwa apabila terdapat peningkatan dalam ketidakwajaran yang diakibatkan oleh pemindahan, maka yang akan hancur pertama kali adalah kaum perempuan. Demikian halnya, status gizi dan kesehatan kaum perempuan lebih rendah daripada laki-laki bahkan dalam keadaan normal. Beberapa kajian telah menunjukkan adanya penurunan keseluruhan dalam status kesehatan, yang sering kali diakibatkan oleh penurunan yang signifikan dalam asupan kalori per kapita. (*Ganguly Thukral 1996*)

**Mobilitas dan wawasan yang terbatas mempengaruhi kemampuan penyesuaian diri kaum perempuan.** Karena kurang lincah dalam hal mobilitas dibandingkan dengan laki-laki, dunia kaum menjadi perempuan lebih terbatas. Oleh karenanya, mereka memiliki kemampuan yang terbatas untuk menghadapi dan menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan baru.

---

## Pengubahan Hak-hak atas Tanah di Vietnam, Lao PDR, dan RRC

Perubahan dari pertanian rumah tangga secara komunal di Vietnam, Masyarakat Republik Demokratik Laos dan Republik Rakyat Cina (RRC) telah menyebabkan kaum perempuan kehilangan "hak" dan kendali atas tanah dan properti. Di ketiga negara tersebut, tanah tetap dimiliki oleh Negara. Karena hukum menetapkan rumah tangga pertanian sebagai unit realokasi dan pendaf-taran tanah, maka hukum tersebut telah mendorong penciptaan rumah tangga-rumah tangga yang mandiri.

Walaupun laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mendaftarkan tanah

di Vietnam, dan Laos, adat istiadat tetap berpengaruh kuat dan tanah didaftarkan atas nama laki-laki saja sebagai kepala rumah tangga.

Hak-hak atas properti di RRC tidak mutlak. Kombinasi atas hak kepemilikan dan penggunaan, tunduk pada kebijakan negara, dan praktek-praktek diskriminatif yang berlaku terhadap kepemilikan, akuisisi, pengelolaan, administrasi, dan pemanfaatan serta disposisi properti menghalangi hak-hak kaum perempuan sebagai hak-hak asasi dan berdampak negatif pada pembangunan masyarakat.

(Tinker dan Summerfield 1999, hlm. 269)

### STUDI KASUS

**Dampak Sosial Dislokasi cenderung lebih besar terhadap kaum perempuan daripada kaum laki-laki.** Keruntuhan jaringan masyarakat dan jaringan sosial lainnya sebagai akibat langsung dari dislokasi akan memberikan dampak pada kaum perempuan lebih besar daripada terhadap laki-laki karena kaum perempuan bersandar dan bergantung pada jaringan masyarakat dan jaringan sosial lainnya untuk mendapatkan dukungan emosional dan praktikal, seperti cara perawatan anak-anak. Dislokasi dapat menjadikan trauma apabila jaringan-jaringan tersebut hancur.

**Meningkatnya kejahatan sosial dan kekerasan terhadap kaum perempuan dapat disebabkan oleh pemindahan.**

Alkoholisme, prostitusi, dan perjudian yang diakibatkan oleh pemindahan berdampak pada kehidupan dan status perempuan. Kaum perempuan terkadang dipaksa menghadapi bentuk-bentuk kekerasan model baru, seperti pelecehan seksual dan prostitusi. Kesenjangan gender yang ada dalam praktik sosial dan tradisi mengakibatkan kaum perempuan rentan terhadap kekerasan seksual dan fisik.

#### TIP

Dislokasi memiliki dampak yang berbeda terhadap kaum perempuan dan laki-laki. Perbedaan-perbedaan tersebut harus diketahui dan dikurangi.



### **Memastikan Partisipasi Kaum Perempuan**

- ➔ Pastikan adanya keterwakilan dan kehadiran kaum perempuan dari berbagai kelompok sosial ekonomi pada seluruh pertemuan.
  - ➔ Pastikan bahwa pertemuan/ konsultasi diorganisir pada saat kaum perempuan merasa nyaman untuk hadir sehingga bisa mencapai partisipasi penuh.
  - ➔ Pastikan bahwa tempat pertemuan ditetapkan dengan mendiskusikannya dengan kaum perempuan sehingga mereka dapat merasa bebas dan tidak terhambat dalam berdiskusi.
  - ➔ Pertimbangkan fasilitator perempuan atau bekerja sama dengan kelompok-kelompok perempuan atau jaringan perempuan secara formal maupun informal.
  - ➔ Libatkan kaum perempuan dalam penggantian kerugian atas orang-orang yang terkena dampak.
  - ➔ Pertimbangkan untuk mengadakan pertemuan dengan kaum wanita secara terpisah.
  - ➔ Pastikan adanya keterlibatan kaum perempuan dalam persiapan dan pengkajian rencana pemukiman kembali.
  - ➔ Penting untuk memberi wewenang asosiasi-asosiasi kaum perempuan, baik dalam tingkat komunitas komunitas, regional maupun nasional. Hal ini akan menciptakan situasi dimana kaum perempuan bisa berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
  - ➔ Pastikan adanya keterlibatan dan partisipasi kaum perempuan dalam implementasi dan monitoring.
  - ➔ Pastikan adanya dokumentasi mengenai partisipasi kaum wanita.
-

## Konsultasi dan Partisipasi

Kebijakan ADB dalam Pemukiman Kembali Paksa dan *Handbook on Restlement* menyoroti pentingnya untuk memberi informasi dan berkonsultasi secara penuh dengan orang-orang yang terkena dampak. Konsultasi ini dilakukan pada saat perencanaan maupun implementasi dan monitoring proyek. Harus dipastikan bahwa pada saat perencanaan dan implementasi pemukiman kembali. Proses konsultasi ini sebaiknya melibatkan kaum perempuan dan memastikan bahwa partisipasi mereka sangat diperlukan dalam mengidentifikasi dampaknya, mengembangkan adanya perbaikan yang memadai, dan juga aktif dalam implementasi dan pemantauannya.

### Isu-isu Utama

- ➔ Faktor-faktor sosial dan budaya akan menghambat kaum perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemukiman kembali. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya khusus untuk memastikan keterlibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan tersebut.
- ➔ Sering kali, para perencana bekerja melalui para elite laki-laki, yang tidak akan mewakili komunitas keseluruhannya, khususnya kaum perempuan.
- ➔ Apabila partisipasi dari kaum perempuan tidak ada, maka bias laki-laki dalam sistem administrasi dan hukum akan merusak hak-hak perempuan dalam institusi-institusi yang umum dan merugikan kaum perempuan yang rentan terhadap hal ini. Para janda, orang-orang tua, perempuan yang bercerai, dan perempuan yang menjadi kepala rumah tangga akan menderita sebagai akibat dari bias ini.
- ➔ Kunci untuk berpartisipasi adalah informasi yang lengkap. Agar orang-orang yang terkena dampak bisa menuntut hak-haknya untuk mendapatkan rehabilitasi, maka mereka harus diberi informasi yang lengkap.

### Pertanyaan-pertanyaan Penting

- ➔ Apakah kaum perempuan yang mewakili seluruh kategori sosioal ekonomi telah dilibatkan dalam proyek tersebut?
  - ➔ Apakah kaum perempuan memiliki informasi mengenai proyek yang diusulkan?
-

- ➔ Apakah kaum perempuan diajak berkonsultasi mengenai rencana pemukiman kembali?
- ➔ Apakah kaum perempuan dilibatkan dalam menyusun rencana pemukiman kembali dan apakah diupayakan agar mereka bisa memberi masukan?
- ➔ Apakah kaum perempuan diminati pendapatnya dalam mengidentifikasi orang-orang yang terkena dampak?
- ➔ Bagaimana cara menginformasikan rencana tersebut kepada kaum perempuan yang terkena dampaknya?
- ➔ Apakah terdapat mekanisme untuk memastikan adanya partisipasi dari kaum perempuan pada setiap tahapan proyek?
- ➔ Apakah sebaiknya diadakan pertemuan-pertemuan yang terpisah bagi kaum perempuan?

### Strategi Utama

- ➔ Pastikan adanya keterwakilan yang cukup dan kehadiran kaum perempuan dari berbagai kelompok sosial ekonomi.
- ➔ Pastikan adanya proporsi atau keterwakilan 50% perempuan selama diadakan perencanaan dan pemaparan rencana pemukiman kembali dan mencari opini dari kaum perempuan terhadap hal tersebut.
- ➔ Pertimbangkan adanya pertemuan-pertemuan yang terpisah dengan kaum perempuan, gunakan fasilitator-fasilitator perempuan untuk meminta pandangan dari kaum perempuan, khususnya tentang isu-isu yang peka seperti toilet, sanitasi, air, dan perencanaan rumah.

### Proyek Rehabilitasi Jalan Raya Ketiga di Vietnam



Dalam Proyek Rehabilitasi Jalan Raya Ketiga di Vietnam, Pusat Gender dan Lingkungan dalam Pembangunan ditunjuk sebagai lembaga pemantau eksternal. Telah direkomendasikan bahwa sebuah wakil dari Serikat Perempuan Vietnam akan dimasukkan ke dalam komite-komite provinsi, distrik, dan masyarakat. Lembaga pemantauan eksternal menggunakan wakil-wakil perempuan sebagai kelompok-kelompok lapangan karena mereka telah dilengkapi dengan sangat baik untuk dapat berhubungan dengan masyarakat yang terkena dampak.

---

# Perencanaan Pemukiman kembali

Sebuah aspek yang esensial dalam perencanaan pemukiman kembali adalah pengumpulan data sosial ekonomi mengenai orang-orang yang terkena dampak. Informasi ini sangat pelik untuk melakukan identifikasi terhadap hal tersebut; membentuk sifat alami dan luasnya dampak, kerentanan dan risiko; dan memastikan bahwa kebutuhan serta kepedulian terhadap kaum perempuan diperhatikan dalam bidang pemukiman kembali dan rehabilitasi.

## Mempertimbangkan Perbedaan Gender dalam Pengumpulan Data

### Isu Utama

- Pengumpulan data yang dipilah berdasarkan gender merupakan langkah pertama dalam menyusun rencana pemukiman kembali yang melibatkan kaum perempuan.

### Pertanyaan-pertanyaan Penting

- Apakah kaum perempuan telah tercakup dalam survei sosial ekonomi ?
- Apakah informasi telah dikumpulkan dari segi status tanah dan properti milik kaum perempuan?
- Apakah survei tersebut memasukkan pertanyaan-pertanyaan tentang pembagian rumah tangga berdasarkan tenaga kerja, sumber-sumber mata pencaharian kaum perempuan, dan kontribusi kaum perempuan untuk memperoleh pendapatan keluarga?

### Strategi-strategi Utama

Kumpulkan data yang dipilah berdasar gender untuk setiap rumah tangga mengenai:

- Kepemilikan dan penggunaan sumber daya.
- Pembuatan keputusan berkenaan dengan penggunaan keuangan dan sumber daya.
- Kegiatan-kegiatan kaum perempuan dalam perolehan pendapatan baik secara formal maupun informal.
- Besarnya ketergantungan kaum perempuan pada ternak, kebun rumah, dan penggunaan hasil hutan; dan
- Ketrampilan-ketrampilan kaum perempuan.

Penting untuk mengumpulkan data mengenai rumah tangga yang dikepalai oleh kaum perempuan, dan mengenai orang kaum perempuan jompo dan yang belum menikah. pertimbangan harus diberikan untuk menggunakan investigator kaum perempuan. Apabila tidak dimungkinkan, investigator-investigator tersebut harus memiliki kepekaan gender dan dilatih untuk mengumpulkan data dari kaum perempuan.

## Menentukan Pemberian Nama dan Pemenuhan Syarat

Hak-hak atas tanah dan properti dapat bersifat formal dan diatur oleh hukum yang umum. Hak-hak formal atas tanah dan properti ditandai oleh ketidaksimetrisan gender yang sangat kentara terlihat di kebanyakan tempat di dunia. Demikian juga, hukum yang umum dan institusi-institusi informal dapat dan telah dikenal diskriminatif.

### TIP

Pengumpulan data yang  
dipilih berdasarkan  
mengenai gender  
merupakan langkah  
pertama dan paling  
krusial untuk  
memastikan rencana  
pemukiman kembali yang  
melibatkan kaum  
perempuan.

Pada saat yang sama, kaum perempuan akan memiliki hak-hak atas properti, air, dan tanah melalui aturan-aturan institusi informal. Hak-hak atas properti sering kali dipahami sebagai sesuatu yang tidak dapat digerakkan dan formal. Hak-hak pun dapat bersifat informal, lincah/dapat bergerak, dan dapat dipindahkan, khususnya berkenaan dengan air, dimana penyediaannya sering kali berdimensi waktu dan ruang.

Oleh karenanya, kriteria yang dapat dipenuhi tidak dapat dibatasi pada kepemilikan atas penamaan-penamaan hukum atas tanah dan properti, karena kaum perempuan cenderung tidak diperhatikan; mereka tidak memiliki kepemilikan properti dan tanah walaupun mereka merupakan pengguna utama atas sumber daya-sumber daya tersebut.

### Isu-isu Utama

- ➔ Harus dibuat ketetapan untuk memastikan bahwa kaum perempuan mendapatkan hak-hak yang sah atas tanah dan properti yang dialokasikan sebagai bagian dari paket pemukiman kembali.
- ➔ Kaum perempuan dapat memiliki hak-hak informal atas properti, air, dan tanah melalui aturan-aturan kelembagaan informal. Penciptaan institusi-institusi formal akan menghancurkan/mengurangi hak-hak yang diabadikan dalam aturan-aturan umum/adat/kebiasaan.
- ➔ Hukum adat dan institusi-institusi informal dapat dan dikenal mendiskriminasi terhadap kaum perempuan.

### Pertanyaan-pertanyaan Penting

- ➔ Apa status kaum perempuan dalam masyarakat?
- ➔ Apakah kaum perempuan memiliki penamaan legal atas tanah dan properti?
- ➔ Kepemilikan, akses, dan pengendalian/pengawasan seperti apakah yang dimiliki kaum perempuan atas sumber daya-sumber daya dan properti?
- ➔ Apakah sumber-sumber mata pencaharian kaum perempuan akan terkena dampaknya?
- ➔ Instrumen-instrumen hukum apa saja yang berlaku?
- ➔ Apakah kaum perempuan memiliki hak-hak adat/umum/biasa atau hak-hak informal atas tanah, properti, dan sumber daya lainnya?

Prinsip kebijakan mengatakan “Kesamaan dan keadilan gender harus ada dan ditaati pada seluruh kebijakan.” Lebih lanjut kebijakan mengatakan bahwa kelompok-kelompok yang rentan harus diberi bantuan yang cukup agar dapat benar-benar meningkatkan standar-standar hidup mereka. Tujuan ini, yang dilengkapi dengan prinsip kesetaraan gender, menjamin keamanan terhadap kaum perempuan yang rentan yang terkena dampak dari pemukiman kembali. *Sri Lanka: Kebijakan Pemukiman kembali Involunter.*

### Strategi-strategi Utama

- ➔ Periksa hukum-hukum tanah dan properti yang berlaku saat ini untuk mengidentifikasi apakah terdapat ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kaum perempuan.
- ➔ Tinjau kembali hukum-hukum yang diterapkan untuk sumber daya alam, seperti:
  - Hukum-hukum penggunaan—berkenaan dengan penggunaan air, pertambangan, dan lainnya;
  - Hukum konservasi—untuk melindungi hutan, kehidupan liar, keanekaragaman hayati (biodiversitas), dan lain-lain;
  - Hukum-hukum akuisisi—berkenaan dengan tanah baik untuk wilayah pedesaan dan perkotaan; dan
  - Hukum-hukum regenerasi—berkenaan dengan perlindungan pada lingkungan, polusi, dan regenerasi tanah dan hutan.
- ➔ Periksa hukum-hukum dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan:
  - Perumahan dan konstruksi;
  - Kepemilikan, pengalihan, dan warisan atas properti; dan
  - Pemukiman kembali dan rehabilitasi.

**Pastikan bahwa kaum perempuan diperhatikan dalam hal:**

- Kompensasi atas aset-aset, pendapatan-pendapatan, dan mata pencaharian-mata pencaharian yang hilang;
- Bantuan untuk relokasi/pindah/penempatan; dan
- Bantuan untuk rehabilitasi.

**Instrumen-instrumen Internasional**

Menghadapi pengusiran paksa /dislokasi involunter, pemindahan berkaitan dengan pembangunan, dan hak atas tanah dan perumahan, penting untuk mengecek apakah pemerintah yang terkait menandatangani perjanjian berkaitan dengan instrumen-instrumen internasional, karena instrumen-instrumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi kebijakan dan perencanaan dalam bidang pemukiman kembali.

## **Membangun Kerangka Kerja Kelembagaan Peka-Gender untuk Proyek-proyek Pemukiman kembali**

Cara beroperasi lembaga-lembaga formal maupun informal di dalam masyarakat mencerminkan hubungan atau relasi gender yang mendasarinya. Penciptaan lembaga-lembaga formal yang baru bisa menghancurkan dan mengikis hak-hak yang dibangun dan diabadikan dalam pengaturan adat-istiadat.

**Isu-isu Utama**

- ➔ Insituti-institusi yang baru dibentuk berpotensi mengikis hak-hak minimum yang dinikmati oleh kaum perempuan dalam institusi-institusi informal yang ada.
- ➔ Aturan-aturan kelembagaan harus (a) tidak memperburuk kesenjangan gender yang ada, (b) menciptakan alternatif-alternatif yang luwes dalam menangani ketidaksetaraan gender, dan (c) mengadakan proses-proses yang berhasil untuk meningkatkan pilihan-pilihan yang diajukan kaum perempuan.

**Strategi Utama**

- ➔ Periksa pengaturan kelembagaan baik formal maupun informal. Buat dan perkuat pengaturan-pengaturan yang mendasari kesetaraan gender dan modifikasi atau ubah pengaturan-pengaturan yang memperbesar disparitas gender.
-

## Mengembangkan Pilihan-pilihan atas Pemukiman Kembali dan Kompensasi

Penting untuk menawarkan berbagai pilihan atas kompensasi dan perbaikan kembali mata pencaharian orang-orang yang terkena dampak. Banyak proyek telah menawarkan pilihan seperti tanah pengganti, “topping up” atau bantuan tambahan uang untuk membeli tanah, menciptakan pekerjaan, dan sering kali pula campuran dari berbagai pilihan.

### Isu-isu Pokok

- ➔ Pembayaran-pembayaran kompensasi pada umumnya merupakan bagian dari domain hukum dan kaum perempuan tidak memenuhi syarat resmi untuk menerimanya. Pembayaran kompensasi kepada kepala rumah tangga tidak selalu didistribusikan sama rata di dalam rumah tangga-rumah tangga. Ketidaksetaraan dalam rumah tangga tersebut harus diberi perhatian.
- ➔ Pengalaman menunjukkan bahwa laki-laki dan kaum perempuan menggunakan uang kompensasi secara berbeda dan bahwa kompensasi yang dibayarkan kepada kepala rumah tangga laki-laki tidak selalu digunakan untuk kepentingan rehabilitasi dan restorasi mata pencaharian. Contoh-contoh penggunaan yang sembrono pada pembayaran-pembayaran kompensasi tersebut oleh laki-laki, seperti untuk konsumsi pribadi atau untuk mendapatkan prestise dan status dalam masyarakat, merupakan hal-hal yang sudah dikenal. Berbagai opsi pembayaran langsung kompensasi untuk kaum perempuan harus diperhatikan secara serius.

### Pertanyaan-pertanyaan Penting

- ➔ Hukum apa yang relevan untuk kompensasi?
- ➔ Bagaimana mendefinisikan “orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi”?
- ➔ Apakah hukum memasukkan kaum perempuan untuk mendapatkan bantuan kompensasi?
- ➔ Pilihan-pilihan kompensasi dan pemukiman kembali apa saja yang dapat dipilih oleh kaum perempuan?

#### TIP

Kembangkan tipe-tipe lain dari kompensasi, penghunian, dan bantuan rehabilitasi yang dapat dibayarkan langsung kepada kaum perempuan, atau kepada kaum perempuan yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya.



### Strategi-strategi Utama

- ➔ Apabila hukum secara eksplisit tidak memasukkan kaum perempuan dalam “kriteria pemenuhan syarat”, mengembangkan paket-paket bantuan untuk kaum perempuan di luar segi hukum sebagai bagian dari paket pemukiman kembali dan kompensasi.
- ➔ Masukkan kaum perempuan dalam pilihan-pilihan konsultasi atau kompensasi.
- ➔ Gali pilihan pembuatan pembayaran-pembayaran atau memberikan nama-nama tanah atas nama kedua belah pihak.
- ➔ Pertimbangkan untuk memberikan kompensasi yang terpisah bagi kaum perempuan atas pendapatan yang hilang, bahkan dari kegiatan-kegiatan sektor informal dan kerugian aset-aset seperti kolam ikan, hutan, sungai, dan lain-lain.
- ➔ Kembangkan pilihan-pilihan yang terpisah untuk program-program restorasi mata pencaharian bagi kaum perempuan.

#### **Menjaga Minat Kaum Perempuan dalam Bidang Pemukiman Kembali**

- ➔ Secara terpisah lakukan identifikasi terhadap kondisi-kondisi sosio-ekonomi, kebutuhan-kebutuhannya, dan prioritas-prioritas kaum perempuan; survei-survei, dan kriteria penamaan harus memperhatikan rumah tangga-rumah tangga yang dikepalai oleh kaum perempuan. Dampak terhadap kaum perempuan harus dipantau dan dievaluasi secara tersendiri.
- ➔ Pastikan bahwa proses akuisisi tanah dan pemukiman kembali tidak merugikan kaum perempuan.
- ➔ Nama-nama tanah/rumah dan hadiah-hadiah/pemberian-pemberian harus atas nama kedua belah pihak.
- ➔ Para staf perempuan harus dipekerjakan oleh lembaga-lembaga pemukiman kembali untuk bekerja dengan dan membantu kaum perempuan dalam semua aspek kegiatan pemukiman kembali, termasuk perencanaan dan implementasi program-program restorasi pendapatan. Melibatkan kelompok-kelompok perempuan dalam perencanaan pemukiman kembali, pengelolaan dan pelaksanaannya, penciptaan pekerjaan, dan mendatangkan pendapatan.

## Pemukiman Kembali dan Rehabilitasi

Pertimbangan atas isu-isu mengenai gender adalah pelik dalam pelaksanaan program pemukiman kembali dan rehabilitasi. Kebutuhan-kebutuhan dan persyaratan-persyaratan khusus dari kaum perempuan harus dipertimbangkan dan diberi perhatian dalam seluruh aspek program—yakni pemilihan tanah, pembuatan lahan dan perumahan, pemberian infrastruktur sipil, akses pada layanan, pemberian nama pada tanah dan perumahan, pembayaran kompensasi, restorasi pendapatan.

Kriteria seleksi perempuan memainkan peranan penting dalam pemilihan lahan relokasi dalam Projek Perbaikan Lingkungan di Kalkuta. Bagi kaum perempuan, pertimbangan-pertimbangan utamanya adalah keamanan lahan dan kedekatan pada lokasi saat ini. Yang disebut terakhir ini merupakan hal yang penting karena beberapa alasan: (i) kesinambungan dalam pekerjaan, (ii) kemampuan untuk pergi ke tempat kerja, (iii) kemampuan untuk kembali ke rumah dengan segera apabila sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat terhadap anak-anak, dan (iv) akses pada layanan-layanan sosial yang mendasar.

Program-program restorasi pendapatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha-usaha pemukiman kembali dan rehabilitasi yang berkesinambungan. Program-program tersebut harus memasukkan pilihan-pilihan berdasarkan tanah/lahan dan bukan berdasarkan tanah/lahan bergantung pada kegiatan-kegiatan pra-proyek yang mendatangkan pendapatan bagi orang-orang yang terkena dampak. Ketentuan-ketentuan yang tersendiri harus dibuat untuk memastikan adanya restorasi pendapatan bagi kaum perempuan.

Pemilihan tanah/lahan, lokasi, desain, dan kesesuaian wilayah fisik merupakan perhatian utama bagi kaum perempuan. Hal ini berkenaan dengan tanggung jawab keluarga yang melibatkan perawatan terhadap anak-anak dan orang-orang tua. Kaum perempuan pun terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang sangat berbasis rumah tangga yang memberikan kontribusi bagi pendapatan rumah tangga. Pembuatan desainnya harus peka terhadap kebutuhan-kebutuhan fungsional atas keperluan-keperluan rumah dan rumah tangga.

## Pemilihan Lahan

### TIP

Pemilihan lokasi lahan untuk tangki air, pipa-pipa berdiri, toilet-toilet, atau fasilitas lain harus dinegoisasikan dengan kaum perempuan karena isu-isu keamanan, privasi, dan norma-norma budaya cenderung lebih mendapatkan perhatian yang besar dari kaum perempuan.

### Isu Utama

→ Alasan-alasan untuk memilih atau menolak sebuah lahan dapat berbeda-beda antara kaum perempuan dan laki-laki. Bagi kaum perempuan, jarak dari tempat kerja, keamanan fisik, ketersediaan fasilitas, khususnya bagi anak-anak, dan kedekatan terhadap sanak keluarga dan jaringan sosial lainnya merupakan beberapa pertimbangan utama.

### Pertanyaan-pertanyaan Penting

- Apakah kaum perempuan yang terkena dampak yang mewakili seluruh kelompok sosio-ekonomi telah diberi tahu tentang lahan-lahan/tanah-tanah alternatif?
- Berapa macam alternatif yang ditunjukkan kaum perempuan?
  - Seberapa jauh lahan/tempat/tanah tersebut dari rumah mereka saat ini?
  - Apakah mereka telah menyetujui lahan tersebut?
  - Apakah sekolah-sekolah dan pusat-pusat kesehatan dapat diakses dengan mudah?
  - Apakah lahan tersebut dekat dengan tempat kerja kaum perempuan tersebut saat ini ataupun mendatangkan pendapatan?

### Strategi-strategi Utama

- Memastikan bahwa paling tidak 50% wakil yang akan memilih dan melihat lahan tersebut adalah kaum perempuan.
- Buat daftar kepedulian kaum perempuan terhadap pilihan-pilihan lahan tersebut.
- Perhatikan dengan seksama mengenai kepedulian kaum perempuan terhadap pilihan-pilihan lahan tersebut sebelum disetujui dan diakhiri.
- Curahkan perhatian pada kebutuhan-kebutuhan untuk kesenangan kaum perempuan seperti pusat-pusat perawatan kesehatan.
- Pastikan adanya perincian tentang lahan-lahan tersebut—lokasi, isu-isu keamanan, kecukupan, dan kelayakan—dibagikan kepada kaum perempuan yang terkena dampak.

### TIP

Keamanan dan jarak dari sumber-sumber pendapatan, sekolah, dan pusat-pusat perawatan kesehatan menjadi kepedulian utama kaum perempuan dalam memilih lahan.

## Perumahan

### TIP

Doronglah agar wanita bisa berpartisipasi dalam pembuatan desain dan pengaturan tata letak perumahan.

### Isu Utama

- Kebutuhan kaum perempuan harus diintegrasikan dalam desain perumahan dan penyediaan fasilitas-fasilitas lain.

### Pertanyaan-pertanyaan Penting

- Apakah kaum perempuan dimintai saran mengenai struktur dan desain perumahan? Apa saja kebutuhan-kebutuhan khusus mereka?
- Bantuan seperti apa yang diperlukan kaum perempuan?
- Apakah kaum perempuan lebih memilih untuk membangun rumah dengan menggunakan uang mereka sendiri ataukah bahan-bahannya disediakan oleh pemerintah atau apakah mereka ingin agar pemerintah menyediakan sarana perumahan?
- Apakah kaum perempuan bersedia berkontribusi terhadap pembiayaan perumahan?
- Tindakan apa saja yang diambil untuk mengakomodasi masalah wanita dalam perumahan?
- Saran apa yang diberikan kaum perempuan berkenaan dengan desain hunian?
- Apakah perempuan lebih menyukai perumahan model berkelompok, yakni orang-orang yang ada dalam satu komunitas berada dalam sebuah perumahan?

"Kaum perempuan dapat berpartisipasi dalam mendesain dan mengatur letak perumahan. Pengembangan infrastruktur di dalam lahan harus memastikan bahwa kaum perempuan memiliki akses yang mudah terhadap pemanfaatan fasilitas-fasilitas sosial dasar seperti air dan sumber-sumber energi untuk rumah tangga. Dalam masyarakat subsisten, seringkali wanita bergantung pada hutan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, bahan bakar atau pakan ternak. Hal ini semacam ini perlu penggantian." (ADB 1998, hlm. 29).

### Strategi Utama

- Pastikan tersedianya bantuan bagi kaum perempuan untuk pembuatan konstruksi rumah-rumah pada lahan yang baru.
- Minta dan doronglah para wanita untuk memberikan masukan dalam perencanaan dan desain pemukiman, struktur dan rencana-rencana perumahan, dan lokasi ruang bebas serta fasilitas-fasilitas.

## Kelayakan dan Keamanan Hunian

### Isu Utama

- Kelayakan untuk ditempati dan keamanan lokasi merupakan masalah yang penting bagi kaum perempuan; mereka menggunakan banyak waktunya di dalam rumah dan bertanggung jawab atas perawatan dan keamanan anak-anak.

Dalam sebuah proyek perbaikan lingkungan perkotaan di Kalkuta, Benggali Barat, baru-baru ini, wanita menunjukkan bahwa tempat yang dipilih sebagai lokasi hunian, meskipun aspek-aspek lainnya memadai, benar-benar tidak sesuai karena angka kejadian kriminal di wilayah tersebut sangat tinggi sehingga membuat mereka tidak merasa aman untuk tinggal di tempat tersebut.

### Pertanyaan-pertanyaan Penting

- Apakah isu-isu kelayakan dan keamanan telah dipertimbangkan?
- Apakah di tempat baru tersebut perempuan menjadi lebih rentan terhadap kekerasan dari luar?
- Apakah kaum perempuan memberikan perhatian pada keamanan?
- Apakah hunian yang baru menghambat mobilitas kaum perempuan?

### Strategi-strategi Utama

- Lahan yang dipilih tidak boleh merupakan wilayah-wilayah yang rapuh secara ekologis, wilayah yang berpolusi, atau sangat jauh dari basis sumber daya alam, jika relokasinya berada dalam wilayah pedesaan.
- Cari pendapat dari kaum perempuan mengenai keamanan dan kelayakan untuk ditempati.

#### India: Perkumpulan Masyarakat untuk Promosi Pusat-pusat Sumber Daya Wilayah



Apabila diberi kesempatan, kaum perempuan bisa membuat dan membangun rumah mereka sendiri. SPARC (Society for Promotion of Area Resources Centres) telah mengorganisasi para wanita penghuni tidak resmi di Mumbai untuk melawan kehancuran. Organisasi milik para wanita tersebut, *Mahila Milan*, telah satu dasawarsa membuat bangunan hunian untuk 500 keluarga di atas tanah milik pemerintah daerah tidak jauh dari jalan beraspal.

## Infrastruktur Sipil

### Isu-isu Utama

- Kebutuhan kaum perempuan dalam infrastruktur sipil didasari oleh pertimbangan budaya dan keamanan, atau apa yang mereka pandang sebagai hal yang penting bagi anak-anak mereka, khususnya anak-anak perempuan. Mereka juga diatur oleh kebutuhan untuk menyediakan air, bahan baku, dan pakan untuk ternak.
- Pemeliharaan infrastruktur sipil sering kali tidak diperhatikan, sehingga akan menambah masalah.

Di Pasig River Environmental and Rehabilitation Management Sector Development Project di Filipina, simpanan dalam dana pinjaman digunakan oleh pemerintah untuk menyusun infrastruktur sosial pada lahan-lahan pemukiman kembali, termasuk sekolah-sekolah, pusat-pusat perawatan anak, pusat-pusat kesehatan, gedung-gedung serbaguna, dan fasilitas-fasilitas rekreasi.

### Pertanyaan-pertanyaan Penting

- Kebutuhan-kebutuhan infrastruktur apa saja yang telah diidentifikasi oleh kaum perempuan?
- Pelayanan apa saja yang akan diperlukan kaum perempuan dan anak-anak dalam hubungannya dengan infrastruktur sipil?
- Bagaimana memelihara lahan dan pelayanan-pelayanan tersebut?

Untuk mempertahankan agar biaya tetap rendah, kaum perempuan membuat balok-balok dan tiang-tiang pracetak, dan menyediakan semua tenaga kerja yang tidak terampil untuk membuat bangunan-bangunan bertingkat dua sebanyak 6 unit, berjumlah 50 buah. Baru-baru ini kelompok sejenis diberi sebidang tanah di mana para wanita ikut membantu membangun apartemen dua lantai dengan bantuan kelompok Mumbai.

ACHR 1998, Bapat 1999, Tinker and Summerfield 1999.

### **Strategi-strategi Utama**

- ➔ Pastikan adanya sistem dalam masyarakat untuk memelihara lahan dan pelayanan-pelayanan tersebut, terutama sistem pembuangan sampah; dan pemerilharaan fasilitas sanitasi khususnya WC umum, tempat mandi dan mencuci, serta fasilitas air minum.
  - ➔ Gali kebutuhan lahan untuk bermain bagi anak-anak, pusat-pusat berkumpulnya masyarakat, tempat pembuangan sampah, fasilitas listrik, dan pusat kesehatan.
- Bagian-bagian berikut ini berkaitan dengan beberapa kebutuhan dasar:

### ***Sanitasi***

#### ***Isu Utama***

- ➔ Kurangnya fasilitas WC dan sanitasi yang layak dalam jumlah yang cukup sangat mempengaruhi kaum perempuan. Masukan-masukan dari mereka mengenai fasilitas-fasilitas tersebut harus diperoleh dan dimasukkan ke dalam rencana pemukiman kembali.

### ***Pertanyaan-pertanyaan Penting***

- ➔ Apakah terdapat kebutuhan untuk tempat-tempat mandi/fasilitas-fasilitas WC/ papan cuci yang terpisah untuk kaum perempuan?
  - ➔ Desain seperti apa dan lokasi mana yang terbaik untuk membangun fasilitas-fasilitas tersebut?
  - ➔ Di mana letak WC umum? Berapa banyak keluarga yang menggunakan per satu WC-nya?
  - ➔ Apakah penting bahwa masyarakat bertanggung jawab memelihara WC tersebut? Apa saja peran kaum perempuan dalam hal ini?
  - ➔ Apakah penerangan untuk tempat-tempat umum dan area-area di sekitar fasilitas WC tersebut dipertimbangkan untuk memastikan adanya keamanan bagi kaum perempuan?
  - ➔ Apa saja mekanisme-mekanisme untuk pembuangan sampah dan limbah, dan apa saja peran masyarakat dalam hal ini?
  - ➔ Apakah ada tempat untuk mandi di dalam rumah-rumah atau adakah tempat-tempat untuk mandi biasa? Berapa banyak keluarga yang akan menggunakan setiap fasilitas biasa? Mekanisme apakah yang digunakan untuk memelihara fasilitas-fasilitas ini?
-

## Strategi-strategi Utama

- ➔ Rencanakan dan buat fasilitas WC dan tempat mandi dengan berkonsultasi dengan kaum perempuan.
- ➔ Pastikan untuk mendapat pandangan kaum perempuan mengenai lokasi fasilitas-fasilitas tersebut.
- ➔ Dapatkan komitmen dari kaum laki-laki maupun perempuan untuk memelihara seluruh fasilitas di luar periode proyek dan bangun mekanisme pemeliharaan fasilitas tersebut.
- ➔ Pastikan bahwa tanggung jawab pengelolaan sampah dan limbah serta pembuangannya diserahkan kepada masyarakat dan pemerintah, serta kepada kaum laki-laki maupun perempuan.
- ➔ Pelatihan atau orientasi dalam pengelolaan sampah dan pembuangan harus melibatkan kaum perempuan.

### TIP

Periksa aksesibilitas fisik dan sosial terhadap sekolah-sekolah.

## Pendidikan

### Isu Utama

- ➔ Dalam situasi-situasi dislokasi tidak suka rela, pemberian pendidikan bebas biaya dan wajib belajar harus menjadi salah satu fasilitas yang akan dikembangkan, seiring dengan pengembangan fasilitas perumahan dan sanitasi.

### Pertanyaan-pertanyaan Penting

- ➔ Berapa jumlah anak sekolah?
- ➔ Berapa jauh jarak yang harus ditempuh anak-anak untuk bersekolah?
- ➔ Apakah terdapat fasilitas-fasilitas pendidikan yang berada dalam lahan relokasi, seperti sekolah dasar atau sekolah menengah tingkat atas?
- ➔ Apakah fasilitas pendidikan dapat diakses secara fisik oleh para penghuni baru?
- ➔ Dapatkah fasilitas-fasilitas yang ada tersebut mengakomodasi anak-anak penghuni baru tersebut?
- ➔ Apabila tidak, persyaratan-persyaratan apakah untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka untuk bersekolah?

### Strategi-strategi Utama

- ➔ Akses kebutuhan-kebutuhan sekolah dan tingkat pendidikan yang dipersyaratkan.
- ➔ Pastikan bahwa infrastruktur pendidikan diberikan. Catatan: biaya konstruksi harus dikeluarkan berdasarkan para pendukung proyek sementara penyelenggaraan sekolah-sekolah biasa merupakan tanggung jawab pemerintah.



## ***Kesehatan***

### ***Isu-isu Utama***

- ➔ Dislokasi tidak sukarela dan pemindahan dapat meningkatkan ketidakwajaran. Hal tersebut dapat mempengaruhi masyarakat secara fisik maupun psikis. Kehilangan tanah atau mata pencaharian dapat mengakibatkan kehilangan harga diri bagi kaum laki-laki, dimana terkadang mengakibatkan kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak-anak.
- ➔ Dampak lingkungan dari proyek tersebut dapat pula mempengaruhi orang-orang yang dipindahkan apabila tidak dikelola dari awal. Proyek-proyek waduk dikenal menghasilkan penyakit *fluorosis* dan *schistosomiasis* sementara itu pembangkit-pembangkit listrik meningkatkan penyakit TBC atau infeksi saluran pernapasan.
- ➔ Fasilitas-fasilitas medis, baik preventif maupun kuratif, perlu direncanakan dengan hati-hati.
- ➔ Merosot atau hilangnya sumber daya-sumber daya pangan akan memberikan dampak gizi yang sangat buruk terhadap kaum perempuan dan anak-anak.

### ***Pertanyaan-pertanyaan Penting***

- ➔ Penyakit-penyakit umum apakah yang menyerang kaum perempuan di wilayah tersebut?
- ➔ Apakah penyakit-penyakit tersebut berhubungan dengan keadaan hidup yang ada?
- ➔ Bagaimana pernyataan saat ini tentang fasilitas-fasilitas medis?
- ➔ Apakah fasilitas-fasilitas medis perlu peningkatan bagi orang-orang yang tidak memerlukan relokasi?
- ➔ Fasilitas-fasilitas kesehatan apakah yang tersedia pada lahan baru?
- ➔ Apakah fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut mencukupi untuk para penghuni baru?
- ➔ Apakah ada potensi terhadap masuknya penyakit-penyakit baru pada lahan relokasi tersebut?
- ➔ Apakah fasilitas-fasilitas kesehatan dapat diakses oleh kaum perempuan dan anak-anak?

### ***Strategi-strategi Utama***

- ➔ Telitilah masalah-masalah kesehatan yang ada saat ini dan intervensi-intervensi yang diperlukan untuk menyelesaikannya.
  - ➔ Kaitkan dengan sistem kesehatan pemerintah.
  - ➔ Rencanakan kebutuhan kesehatan reproduksi bagi kaum perempuan.
  - ➔ Buat mekanisme monitoring untuk melacak masuknya penyakit-penyakit baru.
-

- ➔ Pastikan adanya kedekatan dan ketersediaan pusat-pusat perawatan kesehatan.
- ➔ Pastikan adanya anggaran yang cukup dan alokasi sumber daya untuk memelihara infrastruktur kesehatan yang baru.

"Secara internal, kaum perempuan yang dipindahkan sangat rentan terhadap kekerasan yang khas -gender ketika perlindungan yang diberikan kepada mereka oleh rumah-rumah dan komunitas mereka menghilang dan tekanan terhadap pemindahan tersebut terwujud di dalam unit keluarga. Tindakan-tindakan yang tidak benar tersebut mencakup serangan fisik dan seksual, pemerkosaan, kekerasan di dalam rumah tangga dan pelecehan seksual, peningkatan pemukulan terhadap pasangan dan pemerkosaan pernikahan...Orang-orang yang dipindahkan, dalam hal ini kaum perempuan, sering kali dipaksa memberikan pertolongan seksual dengan imbalan makanan, perlindungan, keamanan, dokumentasi atau bentuk bantuan penting lainnya." (*Francis Deng. United Nations Special Representative on Internally Displaced Persons*)

### ***Pusat Perawatan untuk Anak-anak***

#### ***Isu-isu Utama***

- ➔ Sering kali para gadis tidak dapat bersekolah karena harus mengasuh adik-adik kandungnya. Oleh karenanya, kebutuhan untuk menjajagi pembangunan pusat-pusat perawatan anak-anak akan memberikan manfaat tambahan yang memungkinkan kaum perempuan mengambil pekerjaan yang digaji. Dengan membuat pusat-pusat perawatan tersebut dapat pula memberikan sebuah sumber mata pencaharian bagi beberapa perempuan.

#### ***Pertanyaan-pertanyaan Penting***

- ➔ Berapa banyak anak-anak yang berusia 0-6 tahun?
- ➔ Apa saja susunan/aturan-aturan perawatan anak-anak pada saat ini?
- ➔ Apakah mereka akan terkena dampak dari pemindahan? Bagaimana mereka dapat terkena dampak tersebut?
- ➔ Bagaimana metode-metode budaya membesarkan anak dan merawat anak pada saat ini?
- ➔ Apakah masyarakat bersedia mencari alternatif-alternatif lain?
- ➔ Apakah kaum perempuan bersedia menitipkan anak-anak mereka pada tempat perawatan anak-anak tersebut?
- ➔ Apakah kaum perempuan di dalam komunitas tersebut bersedia membangun atau mengelola pusat-pusat perawatan anak-anak tersebut?
- ➔ Apakah kaum perempuan bersedia membayar untuk perawatan anak-anak tersebut?

#### **TIP**

Menyediakan fasilitas perawatan anak akan memberikan tujuan ganda yakni:

- Merawat anak-anak pada usia rawan yakni 1-6 tahun.
- Memungkinkan para ibu bekerja di luar.
- Memberikan swa-pekerjaan yang potensial pada kaum perempuan di dalam masyarakat.

### ***Strategi Utama***

- ➔ Telitilah apakah terdapat kebutuhan pusat-pusat perawatan anak.
- ➔ Telitilah kesediaan kaum perempuan untuk berkontribusi dan bertanggung jawab atas pusat-pusat perawatan anak tersebut.
- ➔ Perhatikan program dan skema yang dibuat pemerintah saat ini.

## **Isu-isu Transisi**

### **Isu-Isu Utama**

- ➔ Beberapa perempuan mungkin memerlukan bantuan khusus berkenaan dengan transportasi dan transit.
- ➔ Untuk relokasi ke tempat yang baru, periode transisi antara pembongkaran satu rumah dan pemindahan di tempat yang baru merupakan tahapan yang sangat krusial.
- ➔ Pengaturan yang bersifat sementara sering kali tidak menyediakan kebutuhan dasar bagi kaum perempuan dan anak-anak, seperti sanitasi, fasilitas air minum, dan sekolah.

### **Pertanyaan-pertanyaan Penting**

- ➔ Apakah kaum perempuan telah dilibatkan dalam isu-isu transportasi dan transit?
- ➔ Apakah alat transportasi diberikan? Apakah kaum perempuan menyadari mengenai pengaturan-pengaturan transportasi?
- ➔ Apakah kaum perempuan dan kelompok rentan lainnya, yang mungkin memerlukan bantuan khusus untuk transportasi, telah diidentifikasi?
- ➔ Apakah disediakan waktu yang cukup untuk melakukan pembongkaran tempat tinggal lama dan pemukiman kembali, terutama bagi rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan atau orang berusia lanjut?
- ➔ Pengaturan seperti yang telah dibuat untuk memastikan adanya akses terhadap fasilitas-fasilitas dasar ke sekolah bagi anak-anak dalam fase transit mereka?

### **Strategi Utama**

- ➔ Harus disediakan bantuan transportasi yang memadai untuk kaum perempuan, khususnya bagi mereka yang lajang, hamil, dan perempuan-perempuan berusia lanjut, serta perempuan kepala rumah tangga.
  - ➔ Untuk memfasilitasi transisi yang halus dan tidak menyakitkan, pastikan tempat perlindungan rumah sementara dapat diakses dengan dari tempat-tempat pemenuhan kebutuhan dasar.
  - ➔ Pastikan bahwa keluarga-keluarga yang ada berpindah secara bersamaan.
-

## Kompensasi

### TIP

Pastikan adanya distribusi publik yang transparan terhadap kompensasi dengan nama kedua belah pihak.

### Isu-isu Utama

- ➔ Pengalaman menunjukkan bahwa beberapa orang yang terkena dampak proyek pemukiman kembali membelanjakan kompensasi uang tunai secara cepat dan menjadi jatuh miskin.
- ➔ Sering kali, kebutuhan-kebutuhan kaum perempuan dan anak-anak tidak terpenuhi apabila kompensasi uang tunai dibayarkan kepada kaum laki-laki sebagai kepala rumah tangga.
- ➔ Beberapa orang yang terkena dampak mungkin meminta kompensasinya dibayarkan ke rekening bank mereka.

### Pertanyaan-pertanyaan Penting

- ➔ Menurut kaum perempuan, sebaiknya bagaimana pembayaran kompensasi dilakukan—tunai, rekening bank, atau cek?
- ➔ Apakah pembayaran kompensasi dengan nama bersama telah dipertimbangkan?
- ➔ Apakah kaum perempuan memiliki rekening bank atau rekening pos atas nama mereka sendiri untuk menerima kompensasi?
- ➔ Apakah terdapat ketentuan untuk memastikan bahwa kaum perempuan memiliki rekening sendiri?
- ➔ Apakah kaum laki-laki disarankan untuk menggunakan nama bersama dalam menerima pembayaran kompensasi?
- ➔ Apakah terdapat kemungkinan pembayaran kompensasi menggunakan uang tunai yang tersendiri bagi kaum perempuan?
- ➔ Apa kemungkinan resiko yang dihadapi kaum perempuan apabila menerima pembayaran kompensasi dengan uang tunai baik dengan nama bersama atau seluruhnya atas nama perempuan? Dapatkah risiko-risiko tersebut diminimalkan?

### TIP

Apabila memungkinkan, kompensasi sebaiknya tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.

### Strategi-strategi Utama

- ➔ Pastikan bahwa proses pembayaran kompensasi bersifat transparan dan bahwa kompensasi tersebut atas nama pasangan.
- ➔ Otoritas-otoritas proyek harus memastikan bahwa orang-orang yang terkena dampak memiliki rekening bank. Apabila tidak memiliki, bantu mereka untuk membuka rekening bank.

## Keamanan Hak UntuK Tinggal

### TIP

Untuk bantuan atau pemberian apapun dalam proyek pemukiman kembali, berikan untuk atas nama pasangan.

### Isu Utama

- Keamanan hak untuk tinggal merupakan sebuah isu yang sangat penting. Isu ini menjadi lebih penting dalam memindahkan kaum perempuan karena mereka dapat kehilangan haknya. Perempuan lajang, para janda, dan kaum perempuan kepala rumah tangga potensial untuk tidak mendapat tanah dan kekayaan diambil oleh anggota keluarga yang lain.

### Pertanyaan-pertanyaan Penting

- Apakah lahan pemukiman kembali dialokasikan sebagai kepemilikan atau sewa?
- Apakah kaum perempuan diberi informasi mengenai bentuk penamaan kepemilikan tanah dan perumahan baru?
- Bantuan apa yang diberikan kepada kaum perempuan yang tidak mempunyai hak kepemilikan atas tanah/properti yang diambil alih oleh proyek?

Dalam konteks perkotaan, kerentanan para penghuni tidak resmi (penghuni liar) terkait dengan ketiadaan status kepemilikan. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama rentan. Harus dilakukan upaya khusus untuk memastikan bahwa mereka memiliki hak kepemilikan resmi untuk mendapat tinggal atas relokasi.

### Strategi-strategi Utama

- Kepemilikan atau sewa bersama atas tanah dan rumah atas nama pasangan sangatlah krusial.
- Pastikan bahwa kaum perempuan kepala rumah tangga dan janda berikut para putranya yang telah dewasa dan tinggal bersama mereka (apabila mereka tidak diperlakukan sebagai keluarga terpisah), kepemilikan atau sewa harus atas nama perempuan.
- Pastikan bahwa pemindahan hak-hak harus peka-gender.

## Restorasi Pendapatan

### Isu-isu Utama

- ➔ Kebutuhan dan masalah-masalah kaum perempuan kemungkinan besar berbeda dengan kebutuhan dan masalah kaum laki-laki, khususnya dalam hal dukungan sosial, penyediaan pelayanan, pekerjaan, dan sarana subsistensi untuk bertahan hidup. Sebagai contoh, kaum perempuan yang direlokasikan akan menghadapi kesulitan-kesulitan yang lebih besar daripada kaum laki-laki dalam membangun kembali pasar untuk industri rumah tangga yang memproduksi barang-barang perdagangan kecil apabila mereka terhambat oleh kesulitan mobilitas atau karena buta huruf.
- ➔ Program-program restorasi pendapatan harus menyelesaikan isu-isu mengenai gender secara memadai.

“Peran yang kompleks dari seorang perempuan sebagai pengumpul makanan, pengumpul bahan bakar dan air, sebagai ibu dari anak-anak dan rekan dalam kegiatan-kegiatan pertanian menjadikan mereka menerima beban yang tidak proporsional dibanding laki-laki dalam proses pemindahan. Mereka harus ditempatkan kembali pada posisi semula, atau pada pada posisi yang lebih menguntungkan—setelah relokasi. Saya yakin bahwa kaum perempuan memainkan peran yang lebih besar dalam membangun kembali keluarga dan melakukan hubungan-hubungan ekonomi, sementara kaum laki-laki menyesuaikan dengan perubahan-perubahan dan goncangan-goncangan secara pasif.” (*Anita Agnihotri, Direktur sebelumnya, Direktorat Pemukiman kembali dan Rehabilitasi, Pemerintah Orissa*).

### Pertanyaan-pertanyaan Penting

- ➔ Apakah kaum perempuan memberikan kontribusi pada pendapatan keluarga?
- ➔ Bagaimana tingkat pendapatan kaum perempuan sebelum dilakukan pemindahan?
- ➔ Aktivitas apa saja yang dilakukan kaum perempuan untuk memperoleh pendapatan?
- ➔ Apakah sumber-sumber pendapatan ini akan terkena dampak?
- ➔ Berapa banyak kaum perempuan yang dilibatkan dalam ekonomi uang tunai dari ekonomi pedesaan untuk menyambung hidup?
- ➔ Apakah hal itu berarti kehilangan alat penyambung hidup?
- ➔ Cara-cara apa dimana mata pencaharian akan terkena dampaknya? Adakah kehilangan keseluruhan terhadap sumber mata pencaharian atau hanya ada penurunan pendapatan?

- ➔ Apakah lahan baru menyediakan peluang-peluang yang sama atau kesempatan-kesempatan alternatif untuk memperoleh pendapatan?
- ➔ Apa saja tingkat ketrampilan/latihan yang ada untuk kaum perempuan?
- ➔ Adakah kebutuhan untuk meningkatkan ketrampilan-ketrampilan kaum perempuan dan apakah fasilitas-fasilitasnya disediakan?

### *Strategi Utama*

#### **TIP**

Memahami kontribusi perempuan terhadap pendapatan keluarga merupakan langkah pertama untuk merancang program-program restorasi pendapatan bagi mereka

- ➔ Harus dibuat upaya-upaya untuk melindungi sumber-sumber mata pencaharian yang tersedia bagi kaum perempuan dan juga peluang untuk mendatangkan pendapatan. Idealnya, peluang-peluang untuk meningkatkan pendapatan yang ada harus digali.
- ➔ Kehilangan mata pencaharian dan peluang-peluang pendapatan akan memerlukan tindakan restoratif.
- ➔ Menilai kebutuhan-kebutuhan kaum perempuan akan adanya pelatihan ketrampilan untuk memfasilitasi restorasi pendapatan.
- ➔ Pertimbangkan untuk memasukkan kaum perempuan di antara kelompok untuk menerima kesempatan-kesempatan kerja yang digerakkan melalui proyek ini.
- ➔ Libatkan kaum perempuan dalam skema-skema pelatihan kembali yang dimasukkan dalam rencana pemukiman kembali.
- ➔ Gali kesempatan-kesempatan untuk menghubungkan kaum perempuan dengan kelompok-kelompok swadaya dan program-program pendanaan mikro.
- ➔ Buat ketentuan untuk menghubungkan kaum perempuan dengan skema-skema pemerintah yang ada dalam mendatangkan pekerjaan.

### **Skema Irigasi Mahaweli di Sri Lanka**

#### **STUDI KASUS**

Di Sri Lanka, tanah-tanah yang dialokasikan untuk para pasangan etnis Sinhala di dalam skema irigasi Mahaweli didaftarkan atas nama para suami, yang dianggap sebagai kepala rumah tangga. Pengaturan baru ini juga memungkinkan rumah tangga untuk menominasikan pewaris anak laki-laki, apabila keluarga tersebut memilikinya. Hal ini mengganggu aturan lama yang sudah lazim di mana perempuan memiliki hak independen untuk memiliki dan mengendalikan tanah. Dalam skema Mahaweli, para janda-cerai akan kehilangan hak atas tanah, yang menyebabkan mereka menjadi tergantung dan pada posisi lebih rendah. Sekitar 6% relokasi tanah dalam skema irigasi ini dibuat untuk kaum laki-laki. Dari 16 orang perempuan yang diberi lahan, hanya 2 orang (seorang janda cerai-mati dan seorang janda yang hidup berpisah dari suaminya) yang hidup dalam wilayah proyek dan mengelola tanah-tanah pertanian mereka sendiri. (Schrijvers, di Agarwal 1994. hlm. 290).

## Pertimbangan-Pertimbangan Kelembagaan

Pertimbangan kelembagaan penting untuk memastikan bahwa hanya lembaga yang sesuai yang diberi mandat untuk merencanakan dan mengimplementasikan program-program kompensasi, restorasi pendapatan, dan rehabilitasi. Lembaga-lembaga ini harus diidentifikasi sedini dalam persiapan proyek.

Pembatasan-pembatasan budaya dan tidak adanya hubungan dengan birokrasi menyebabkan wanita tidak bisa berpartisipasi dalam struktur lembaga formal. Penting sekali untuk memastikan dibentuknya mekanisme yang memungkinkan partisipasi kaum perempuan. Kemauan politik menjadi dasar yang penting untuk mempertahankan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan.

## Kapasitas Kelembagaan

Tiga tingkatan yang harus dipertimbangkan:

- Otoritas proyek
- Pemerintah daerah
- Masyarakat

### *Isu-isu Utama*

- ➔ Lembaga pelaksana yang bertanggung jawab atas perencanaan dan mengimplementasikan program-program pemukiman kembali dan rehabilitasi mungkin tidak memiliki kapasitas *gender-and-development* (GAD).
  - ➔ Pemerintah setempat harus dilibatkan dalam implementasi proyek untuk memastikan kesinambungannya dan harus memiliki kapasitas kelembagaan yang layak untuk mengimplementasikan aspek-aspek gender dan rencana-rencana pemukiman kembali.
  - ➔ Penting untuk membangun struktur dan mekanisme untuk memastikan keterlibatan dan partisipasi orang-orang yang terkena dampak dalam perencanaan, implementasi, dan monitoring. Dalam hal ini, bisa dipertimbangkan untuk dibentuk suatu komite yang anggotanya dipilih atau kelompok perwakilan.
-



### Pertanyaan-pertanyaan Penting

- è Apakah kebijakan-kebijakan kelembagaan yang ada bersifat peka-gender?
- è Apa sajakah komitmen dan pengalaman lembaga pelaksana, pemerintah setempat, atau personil lembaga dalam menangani isu-isu mengenai gender?
- è Apa saja komitmen pemerintah setempat dalam mengimplementasikan aspek-aspek gender pada perencanaan pemukiman kembali?
- è Pada saat ini, adakah ahli-ahli mengenai gender dan pembangunan?
- è Apakah diperlukan pelatihan atau pembentukan kapasitas?
- è Bagaimana pendistribusian staf berdasarkan gender?
- è Apakah gagasan-gagasan dan intervensi berkenaan dengan gender telah dianggarkan?

### Strategi-strategi Utama

- è Pastikan bahwa lembaga-lembaga pelaksana telah memiliki kapasitas mengenai gender dan pembangunan, dan kapasitas untuk menangani kemiskinan.
- è Apabila tidak memilikinya, rencanakan untuk membentuk kapasitas mengenai gender dan pembangunan.
- è Tingkatkan distribusi staf yang setara berdasarkan jenis kelamin.
- è Pastikan adanya keterwakilan yang proporsional atas kaum perempuan di seluruh komite.
- è Seorang spesialis mengenai gender harus dimasukkan ke dalam tim tersebut.
- è Pastikan bahwa Ornop-Ornop yang direkrut untuk membantu dalam mengimplementasikan pemukiman kembali telah memiliki perspektif gender dan pengalaman yang diperlukan dalam menangani kelompok-kelompok yang rentan.
- è Tim Ornop harus memasukkan staf perempuan.

#### Pastikan bahwa pengaturan kelembagaan:

- Tidak memperburuk disparitas atau diskriminasi gender;
- ciptakan alternatif-alternatif yang fleksibel untuk menangani kesenjangan tersebut;
- adakan proses-proses yang dapat berhasil dalam meningkatkan pilihan-pilihan kaum perempuan, bahkan apabila hal tersebut dimaksudkan sebagai partisan terhadap pemberdayaan kaum perempuan; dan
- masukkan keterwakilan kaum perempuan pada seluruh tingkatan.

## Mekanisme Tuntutan Ganti Rugi

Mekanisme ganti rugi secara umum terdiri atas dua jenis: pengaturan ganti rugi atas akuisisi tanah melalui keputusan pengadilan resmi atau membentuk komite ganti rugi atau *Grivance Redress Committee* (GRC) untuk menyelesaikan perselisihan mengenai manfaat-manfaat pemukiman kembali. Prosedur-prosedur operasional untuk GRC harus diformalkan dan dibentuk secara jelas dalam rencana pemukiman kembali.

### Isu-isu Utama

- ➔ Mekanisme-mekanisme yang rumit yang menggunakan struktur-struktur hukum formal cenderung bertentangan dengan kaum perempuan, karena pada umumnya kaum perempuan tidak akrab dengan institusi-institusi formal.
- ➔ GRC harus dibentuk secukupnya untuk menangani isu-isu gender yang akan timbul dan termasuk mekanisme-mekanisme untuk menyediakan layanan-layanan khusus bagi kaum perempuan.

### Pertanyaan-pertanyaan Penting

- ➔ Apakah mekanisme yang menangani keluhan tersebut disusun untuk menyoroti isu-isu gender?
- ➔ Apakah GRC bersifat peka-gender?
- ➔ Apakah masalah-masalah khusus yang dihadapi kaum perempuan juga diperhatikan oleh GRC?
- ➔ Adakah anggota kaum perempuan pada GRC atau kelompok terkait yang telah atau akan dibentuk?

### Strategi-strategi Utama

- ➔ Diskusikan struktur mekanisme ganti kerugian yang diusulkan bersama-sama dengan kaum perempuan.
- ➔ Dapatkah kaum perempuan mengakses dan menggunakan mekanisme tersebut dengan mudah?
- ➔ Pastikan kehadiran kaum perempuan pada GRC atau kelompok yang terkait pada tingkat formal ataupun informal.
- ➔ Harus memasukkan pelatihan personil GRC dalam menangani isu-isu peka-gender.
- ➔ Sejauh mungkin, mekanisme-mekanisme harus dibuat yang tidak mensyaratkan kaum perempuan ke dalam pengadilan, karena kaum perempuan biasanya

merasa sulit untuk mengakses mesin hukum.

## Pendanaan

Identifikasi wilayah-wilayah yang masyarakatnya memerlukan pendanaan untuk memastikan keberhasilan program-program pemukiman kembali dan rehabilitasi. Sebagai contoh, pemeliharaan fasilitas-fasilitas masyarakat harus digali lebih lanjut. Identifikasi kesediaan masyarakat untuk memberikan kontribusi secara finansial untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas tersebut. Kontribusi bersama akan relevan pula untuk mengoperasikan dan memelihara infrastruktur-infrastruktur sosial atau kelompok seperti fasilitas air dan sanitasi, tempat pembuangan sampah, dan gedung-gedung serbaguna.

## Anggaran Pemukiman Kembali

Apabila anggaran pemukiman kembali tidak menyiapkan dana untuk program khusus yang terkait dengan kaum perempuan dan anak-anak, maka pendanaan tersebut tidak akan disediakan.

### Pertanyaan-pertanyaan Penting

- ➔ Apakah rencana pemukiman kembali tersebut mengidentifikasi adanya sumber-sumber finansial yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan gender?
- ➔ Apakah ketentuan-ketentuan khusus untuk menangani isu-isu gender dimasukkan ke dalam mata anggaran?

### Strategi-strategi Utama

- ➔ Pastikan bahwa anggaran pemukiman kembali telah mengalokasikan dana dengan cukup untuk aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan gender.
  - ➔ Apabila mungkin, masukkan anggaran yang terpisah untuk menangani permasalahan gender secara khusus.
  - ➔ Upayakan untuk menyediakan anggaran yang terpisah untuk menangani masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan kaum perempuan.
  - ➔ Pastikan bahwa kaum perempuan sadar mengenai alokasi anggaran untuk menangani masalah-masalah mereka.
  - ➔ Lacak pengeluaran-pengeluarannya dan pastikan bahwa dana-dana tersebut
-

digunakan secara benar.

## Monitoring dan Evaluasi

Rencana pemukiman kembali sebaiknya dipantau dalam dua tingkat, yakni: (i) oleh otoritas proyek (secara internal maupun eksternal) dan (ii) oleh masyarakat melalui partisipasi orang-orang yang terkena dampak serta Ornop-Ornop

### Isu-isu Utama

- ➔ Indikator-indikator untuk monitoring dan evaluasi (M&E) harus memasukkan pertanyaan-pertanyaan dan indikator-indikator khusus gender. M&E sebaiknya dilaksanakan secara bersama-sama dengan para otoritas proyek, para pemantau eksternal, dan masyarakat.

### Pertanyaan-pertanyaan Penting

- ➔ Apakah indikator-indikator M&E memasukkan isu-isu mengenai restorasi mata pencaharian kaum perempuan, keamanan, kelayakan untuk ditempati, dan isu-isu lain yang disoroti dalam daftar periksa ini?
- ➔ Apakah lembaga-lembaga yang ditunjuk memiliki kepekaan mengenai gender?
- ➔ Apakah anggarannya cukup untuk menangani isu-isu gender?
- ➔ Apakah basis M&E telah mencakup gender?
- ➔ Apakah mekanisme-mekanisme yang layak telah dikembangkan untuk pemantauan partisipatif dan apakah kaum perempuan juga dilibatkan?
- ➔ Apakah isu-isu gender dilibatkan dalam TOR konsultan-konsultan pengawasan?

#### TIP

Monitor dan evaluasi dampak pada kaum perempuan secara terpisah.

### Strategi-strategi Utama

- ➔ Majukan partisipasi kaum perempuan dalam perencanaan, pembuatan, dan implementasi M&E.
- ➔ Pastikan bahwa mekanisme-mekanisme kelembagaan ditata baik pada kedua tingkatan otoritas proyek dan masyarakat melibatkan kaum perempuan dalam kelompok.
- ➔ Pastikan bahwa M&E memasukkan input-input khusus dari kaum perempuan.
- ➔ Pastikan bahwa mekanisme-mekanisme berbasis masyarakat telah secara proporsional mewakili kaum perempuan.
- ➔ Masukkan gender ke dalam TOR konsultan.
- ➔ Pastikan bahwa implementasi aspek-aspek gender benar-benar ditinjau dan dilaporkan oleh staf yang melaksanakan misi peninjauan.

## Instrumen-instrumen Internasional

**Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing. Konferensi  
Kaum Perempuan Dunia Ke-4, Beijing, RRC,  
4-15 September 1995**

“Memasukkan dampak gender dalam Komisi dan Pembangunan Berkelanjutan dan lembaga-lembaga PBB lainnya dan dalam kegiatan-kegiatan institusi-institusi keuangan internasional.” (para, 254 [a])

“Disintegrasi keluarga, pergerakan populasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam negara-negara, migrasi-migrasi internasional, perang, dan pemindahan-pemindahan internal merupakan faktor-faktor yang memberikan pengaruh pada kaum perempuan sebagai kepala rumah tangga.” (para. 21)

“Memperbarui praktik-praktik hukum dan administrasi untuk memastikan adanya kesetaraan hak bagi kaum perempuan dan akses pada sumber-sumber ekonomi.” (item A2)

“Menggerakkan dan menyebarkan data yang dipilih berdasarkan gender serta informasi untuk perencanaan dan evaluasi.” (item H3)

“Melaksanakan pengukuran-pengukuran untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pembuatan dan implementasi dari—di antara hal lainnya—mekanisme-mekanisme pengelolaan sumber daya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, teknik-teknik produksi serta pembangunan infrastruktur dalam wilayah-wilayah pedesaan dan perkotaan.”

### **Konvensi Penghapusan Seluruh Bentuk Diskriminasi terhadap kaum Perempuan, 1979**

Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Kaum Perempuan tersebut menyatakan bahwa “Negara-negara/Seluruh Pihak harus melaksanakan pengukuran-pengukuran yang layak untuk menghapuskan diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam wilayah-wilayah pedesaan dalam rangka untuk memastikan, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, bahwa mereka berpartisipasi di dalam dan mendapatkan manfaat dari pembangunan pedesaan dan, secara khusus, harus memastikan terhadap kaum perempuan tersebut adanya hak... (h) untuk menikmati keadaan penghidupan yang cukup, khususnya dalam hubungannya dengan penyediaan perumahan, sanitasi, listrik dan air, transportasi, dan komunikasi.”

Komite tersebut telah memfokuskan perhatiannya pada kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan untuk mengakses, memiliki, dan mewarisi tanah, karena hal ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi situasi kaum perempuan pedesaan. Perhatian-perhatian telah tertuju pada dampak negatif globalisasi dan kebijakan-kebijakan makroekonomi pada ekonomi pedesaan dan pada distribusi tanah melalui mekanisme-mekanisme pasar secara khusus. Bahkan di dalam negara-negara dimana hukum memberikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal tanah, sikap hati-hati Komite tersebut yang memberikan prasangka-prasangka dan hak-hak adat/kebiasaan sering kali menghalangi implementasi hukum tersebut.

Komite ini pun telah memperhatikan kebutuhan akan perlakuan yang setara bagi kaum perempuan dalam berbagai skema pemerintah untuk tunjangan perumahan, pinjaman pemerintah untuk perumahan, dan akses pada kredit, dan juga penyediaan yang sama pada perumahan untuk para buruh. Komite tersebut mendorong Negara-negara/Pihak-pihak untuk memberikan perhatian penuh pada kebutuhan-kebutuhan kaum perempuan pedesaan dan memastikan peran aktif dan partisipatif mereka dalam pembuatan, implementasi, dan pemantauan seluruh kebijakan dan program yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat kepada mereka, khususnya kaum perempuan yang merupakan kepala rumah tangga dan kepala keluarga mereka, di wilayah-wilayah seperti akses pada layanan kesehatan dan layanan sosial, proyek-proyek yang mendatangkan pendapatan, serta perumahan

### Komite Hak-hak atas Ekonomi, Sosial dan Budaya

Komite hak-hak atas Ekonomi, Sosial dan Budaya melaksanakan diskusi umum sehari atas isu hak atas perumahan yang layak pada sesi ke-4 pada tahun 1990, dan pada bulan Desember 1991 komite ini pada sesi ke-6 mengambil Ulasan Umum No. 4 yakni hak atas perumahan yang layak.<sup>1)</sup> Ulasan Umum tersebut mencerminkan konsepsi secara keseluruhan atas hak dan nilai yang dihasilkan dari aspek kecukupan. Komite tersebut memberikan petunjuk bagi Negara-negara/Pihak-pihak untuk tidak menginterpretasikan hak atas perumahan secara sempit atau terbatas “hanya pada memiliki atap di atas kepala seseorang ... atau sebagai sebuah komoditas. Namun harus dilihat sebagai hak untuk hidup di suatu tempat yang aman, tentram dan bermartabat.” (para. 7).

Berdasarkan interpretasi yang luas ini, Ulasan Umum tersebut mengidentifikasi 7 aspek hak atas perumahan yang menentukan “kecukupan”: (a) keamanan hukum atas hak milik, termasuk perlindungan hukum terhadap pengusiran dengan pemaksaan; (b) ketersediaan layanan-layanan, material-material, fasilitas-fasilitas, dan infrastruktur; (c) kemampuan untuk dibeli; (d) kelayakan untuk ditempati; (e) kemampuan akses pada

kelompok-kelompok miskin; (f) lokasi; dan (g) kecukupan budaya. (para. 8)

Pada sesi ke-16 pada tahun 1997, komite ini mengambil Ulasan Umum No.7 atas pengusiran dengan pemaksaan/kekuatan<sup>2)</sup>, yang ditentukan dengan istilah sebagai “penghilangan secara permanen atau temporer terhadap keinginan para individual, keluarga dan /atau masyarakat dari rumah-rumah mereka dan/atau tanah yang mereka tempati, tanpa penyediaan, dan akses pada bentuk-bentuk perlindungan hukum atau perlindungan lainnya yang layak.”(para. 3) Ulasan Umum No. 7 menjelaskan kewajiban-kewajiban Negara-negara/Pihak-pihak untuk menggunakan “segala cara yang layak” seiring dengan Pasal 2.1 Perjanjian, dan menyatakan bahwa “hukum untuk melawan pengusiran dengan pemaksaan merupakan dasar esensial untuk membangun sebuah sistem perlindungan yang efektif.” (para. 9)

Ulasan Umum No. 6 (sesi ke-13, tahun 1995) mengenai hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya orang-orang tua menekankan, inter alia, “...bahwa perumahan untuk orang-orang tua harus dilihat sebagai lebih dari sebuah tempat berteduh dan bahwa, selain secara fisik, hal itu memiliki arti penting secara psikologis dan sosial yang harus diperhatikan.” (para. 32)

<sup>1)</sup> Terdapat dalam dokumen E/1992/23. Juga tersedia dalam website Kantor Komisioner Tinggi untuk Hak-hak Asasi Manusia (OHCHR).

<sup>2)</sup> Terdapat dalam dokumen E/1998/22, annex IV. Juga tersedia di website OHCHR.

## Referensi

- Agarwal, B. 1994. *Field of One's Own. Gender and Land Rights in South Asia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Agnihotri, Anita. 1998. The Orissa Resettlement and Rehabilitation of Projects Affected Persons's Policy. Dalam A.B. Ota dan R.N. Mohanty (eds). *Development Induced Displacement and Rehabilitation*. Bhubaneswar, India: Prachi Prakashan.
- Asian Centre for Housing Reform (ACHR). 1998. E-News No. 13, Monday 19 January. Availabe: to her Maurice@ksc9.th.com.
- Bapat, Meera. 1999. Women and Housing: A Training Manual. Dalam Irene Tinker dan Gale Summerfield (eds). *Women's Rights To House and Land: China, Laos, Vietnam*. London: Lynne Rienner Publishers.
- Ganguly Thukral, E. 1992. *Big Dams, Displaced Peoples: Rivers of Sorrow, Rivers of Joy*. Delhi: Sage Publications.
- . 1996. "Development, Displacement and Rehabilitation: Locating Gender." *Economic and Political Weekly*. 31 (24): 1500-1503.
- . 2000. *Mainstreaming Gender Concerns in Resettlement Planning*. Calcutta Environmental Improvement Project (CEIP). Dokumen yang dipersiapkan untuk Asian Development Bank, Manila.
- Mehta, Lyla, dan Bina Srinivasan. 2000. *ANNEX B: Balancing Pains and Gains. A Perspective Paper on Gender and Large Dams*. Final Paper. World commission on Dams.
- Operations Evaluation Department. 1998. Recent Experiences with Involuntary Resettlement: China-Shuikou (and Yantan). No. 17539. Washington D.C.: World Bank.



Srinivasan, Bina. 2001. "Social Impacts of Large Dams. Gender, Equity and Distribution Issues." *Economic and Political Weekly* 36 (43).

Tinker, Irene, dan Gale Summerfield, editors, 1999. *Women's Rights to House and Land: China, Laos, Vietnam*. London: Lynne Rienner Publishers.

United Nations Center for Human Settlements (UNCHS). 1999. *Women's Rights to Land, Housing and Property in Post-Conflict Situations and During Reconstruction: A Global Overview*. Nairobi: UNCHS.

---





# **DAFTAR PERIKSA (CHECK LIST) GENDER DALAM BIDANG PEMUKIMAN KEMBALI**

Asian Development Bank  
Februari 2003

---





- Staf ADB dan para konsultan ADB sebaiknya menggunakan daftar periksa Gender dan Pemukiman kembali bersamaan dengan *Resettlement Handbook* untuk mengidentifikasi isu-isu gender dalam keseluruhan proses perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi pemukiman kembali.
- Harus diperhatikan bahwa seluruh pertanyaan mungkin tidak relevan dengan seluruh proyek. Pertanyaan-pertanyaan harus dipilih berdasarkan sifat dasar proyek dan konteks sosio-budaya.